



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1023, 2020

LKPP. Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan.

## PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG  
HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi jabatan untuk memperoleh nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*) bagi kelas jabatan Auditor dan Widyaiswara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 603), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dibayarkan dihitung sejak pejabat/pegawai diangkat ke dalam jabatan tersebut.

Pasal 3

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012  
 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI  
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
1	Sekretaris Utama	<b>16</b>
2	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	<b>15</b>
3	Kepala Bagian Program dan Anggaran	<b>12</b>
4	Kepala Subbagian Program	<b>9</b>
5	Kepala Subbagian Anggaran	<b>9</b>
6	Kepala Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	<b>12</b>
7	Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I	<b>9</b>
8	Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja II	<b>9</b>
9	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	<b>12</b>
10	Kepala Subbagian Organisasi	<b>9</b>
11	Kepala Subbagian Tata Laksana	<b>9</b>
12	Kepala Biro Umum dan Keuangan	<b>15</b>
13	Kepala Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	<b>12</b>

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
14	Kepala Subbagian Pengadaan	<b>9</b>
15	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<b>9</b>
16	Kepala Bagian Keuangan	<b>12</b>
17	Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan	<b>9</b>
18	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran	<b>9</b>
19	Kepala Bagian Tata Usaha, Karsipan dan Rumah Tangga	<b>12</b>
20	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan	<b>9</b>
21	Kepala Subbagian Rumah Tangga	<b>9</b>
22	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	<b>15</b>
23	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	<b>12</b>
24	Kepala Subbagian Hukum	<b>9</b>
25	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	<b>9</b>
26	Kepala Bagian Sistem Informasi	<b>12</b>
27	Kepala Subbagian Data dan Informasi	<b>9</b>
28	Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi	<b>9</b>
29	Kepala Bagian Kepegawaian	<b>12</b>
30	Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi	<b>9</b>
31	Kepala Subbagian Pengembangan	<b>9</b>
32	Deputi bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	<b>16</b>
33	Direktur Pengembangan Strategi dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Umum	<b>15</b>
34	Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Umum	<b>12</b>
35	Kepala Seksi Pengkajian Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	<b>9</b>
36	Kepala Seksi Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	<b>9</b>
37	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum	<b>12</b>
38	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Umum	<b>9</b>

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
39	Kepala Seksi Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum	<b>9</b>
40	Direktur Pengembangan Strategi dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Khusus	<b>15</b>
41	Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus	<b>12</b>
42	Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus I	<b>9</b>
43	Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus II	<b>9</b>
44	Kepala Subdirektorat Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus	<b>12</b>
45	Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus I	<b>9</b>
46	Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus II	<b>9</b>
47	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	<b>15</b>
48	Kepala Subdirektorat Iklim Usaha	<b>12</b>
49	Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha	<b>9</b>
50	Kepala Seksi Kesempatan Usaha	<b>9</b>
51	Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional	<b>12</b>
52	Kepala Seksi Multilateral	<b>9</b>
53	Kepala Seksi Bilateral	<b>9</b>
54	Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengadaan	<b>16</b>
55	Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	<b>15</b>
56	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan	<b>12</b>
57	Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga	<b>9</b>
58	Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah	<b>9</b>
59	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan	<b>12</b>
60	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga	<b>9</b>

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
61	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah Daerah	<b>9</b>
62	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	<b>15</b>
63	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kebijakan dan Monitoring Evaluasi Sistem Katalog	<b>12</b>
64	Kepala Seksi Kebijakan Katalog	<b>9</b>
65	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katalog	<b>9</b>
66	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional	<b>12</b>
67	Kepala Seksi Prakatalog	<b>9</b>
68	Kepala Seksi Pasca Katalog	<b>9</b>
69	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	<b>15</b>
70	Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi	<b>12</b>
71	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE	<b>9</b>
72	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE	<b>9</b>
73	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<b>12</b>
74	Kepala Seksi Layanan Dukungan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik	<b>9</b>
75	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<b>9</b>
76	Deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia	<b>16</b>
77	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	<b>15</b>
78	Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan	<b>12</b>
79	Kepala Seksi Standar kompetensi	<b>9</b>
80	Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan	<b>9</b>
81	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan	<b>12</b>
82	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan	<b>9</b>
83	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan	<b>9</b>
84	Direktur Sertifikasi Profesi	<b>15</b>

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
85	Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi	<b>12</b>
86	Kepala Seksi Sistem Sertifikasi	<b>9</b>
87	Kepala Seksi Sarana Sertifikasi	<b>9</b>
88	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sertifikasi	<b>12</b>
89	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional	<b>9</b>
90	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional	<b>9</b>
91	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	<b>16</b>
92	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	<b>15</b>
93	Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<b>12</b>
94	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	<b>9</b>
95	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<b>9</b>
96	Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman	<b>12</b>
97	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian	<b>9</b>
98	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman	<b>9</b>
99	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	<b>15</b>
100	Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Barat	<b>12</b>
101	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat I	<b>9</b>
102	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat II	<b>9</b>
103	Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Timur	<b>12</b>
104	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur I	<b>9</b>
105	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur II	<b>9</b>
106	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	<b>15</b>
107	Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Kontrak	<b>12</b>
108	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Barat	<b>9</b>

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
109	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Timur	<b>9</b>
110	Kepala Subdirektorat Dukungan Penegakan Hukum	<b>12</b>
111	Kepala Seksi Pengelolaan Keterangan Ahli Pengadaan	<b>9</b>
112	Kepala Seksi Pengelolaan Pengaduan	<b>9</b>
113	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ	<b>15</b>
114	Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi	<b>12</b>
115	Kepala Subbidang Program dan Kurikulum	<b>9</b>
116	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi	<b>9</b>
117	Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	<b>12</b>
118	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	<b>9</b>
119	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	<b>9</b>
120	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdiklat PBJ	<b>9</b>
121	Inspektur	<b>15</b>
122	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	<b>9</b>

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR  
 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI  
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)	FAKTOR 5 R. Lingkup & Pengaruh (Level 1~5)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~5)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level :1~4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)		
											1	2	1	2	1
1	PENGEMUDI	3	370	2	200	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25
2	ARSIPARIS PELAKSANA	6	755	4	550	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25

3	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7	855	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
4	PENGADMINISTRASI UMUM	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
5	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	PENGELOLA	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
8	PENGOLAH DATA	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
9	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	PENYUSUN BAHAN	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	25	2	50	1	5	1	5
11	PENYUSUN LAPORAN BMN	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	25	2	50	1	5	1	5
12	PENATA KEUANGAN	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	25	2	50	1	5	1	5
13	PERENCANA PERTAMA	8	1110	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	2	25	2	25	2	50	1	5	1	5
14	PERENCANA MUDA	9	1460	5	750	3	275	2	125	2	75	2	150	3	25	2	25	2	50	1	5	1	5
15	PERANCANG PERATURAN PER-UU PERTAMA	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	2	60	3	60	2	50	1	5	1	5
16	PERANCANG PERATURAN PER-UU MUDA	9	1495	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	60	3	60	2	50	1	5	1	5
17	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	1110	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	2	25	2	25	2	50	1	5	1	5

18	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9	1460	5	750	2	275	2	125	2	75	3	150	2	2	25	2	50	1	5	1	5
19	PRANATA HU MAS PERTAMA	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	3	60	2	50	1	5	1	5
20	PUSTAKAWAN PERTAMA	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	3	60	2	50	1	5	1	5
21	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	790	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	1	10	1	20	1	5	1	5
22	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	890	4	550	2	125	1	.25	2	75	2	75	1	1	10	1	20	1	5	1	5
23	PRANATA KOMPUTER PENVELIA	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	2	25	1	20	1	5	1	5
24	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	1195	5	750	2	125	1	25	3	150	2	75	1	1	10	2	50	1	5	1	5
25	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	1460	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	2	25	2	50	1	5	1	5
26	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	2	25	1	20	1	5	1	5
27	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	8	1105	5	750	2	125	1	25	2	75	2	75	2	2	25	1	20	1	5	1	5
28	WIDYAISWARA UTAMA	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	2	25	1	20	1	5	1	5
29	WIDYAISWARA MADYA	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	2	25	1	20	1	5	1	5
30	WIDYAISWARA MUDA	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	2	25	1	20	1	5	1	5
31	WIDYAISWARA PERTAMA	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	2	25	1	20	1	5	1	5
32	AUDITOR UTAMA	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	2	25	1	20	1	5	1	5

33	AUDITOR MADYA	11	1930	6	950	3	275	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
34	AUDITOR MUDA	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
35	AUDITOR PERTAMA	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO